

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Program Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat salah satu program unggulan daerah melaksanakan wajib belajar 16 (enam belas) tahun, serta dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau; yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Rancangan awal Renstra sebagai penjabaran dari Tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pendidikan daerah yang disesuaikan dengan RPJMD.

2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Renstra.

Musrenbang Renstra diselenggarakan oleh Sekretariat Dinas pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang diikuti oleh semua bidang teknis, sekretariat dan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan materi rancangan awal Renstra.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil Musrenbang Renstra, Bidang Perencanaan, Keuangan dan BMD Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau menyusun Rancangan Akhir Renstra.

Hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malinau

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif.

2. Hubungan Renstra dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Renja-PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra.

3. Hubungan Renstra dengan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah dokumen operasional SKPD pada tingkat kabupaten untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai rencana kerja operasional Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

1. 2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah :

1. Maksud

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

1`4. Sistematika Penulisan

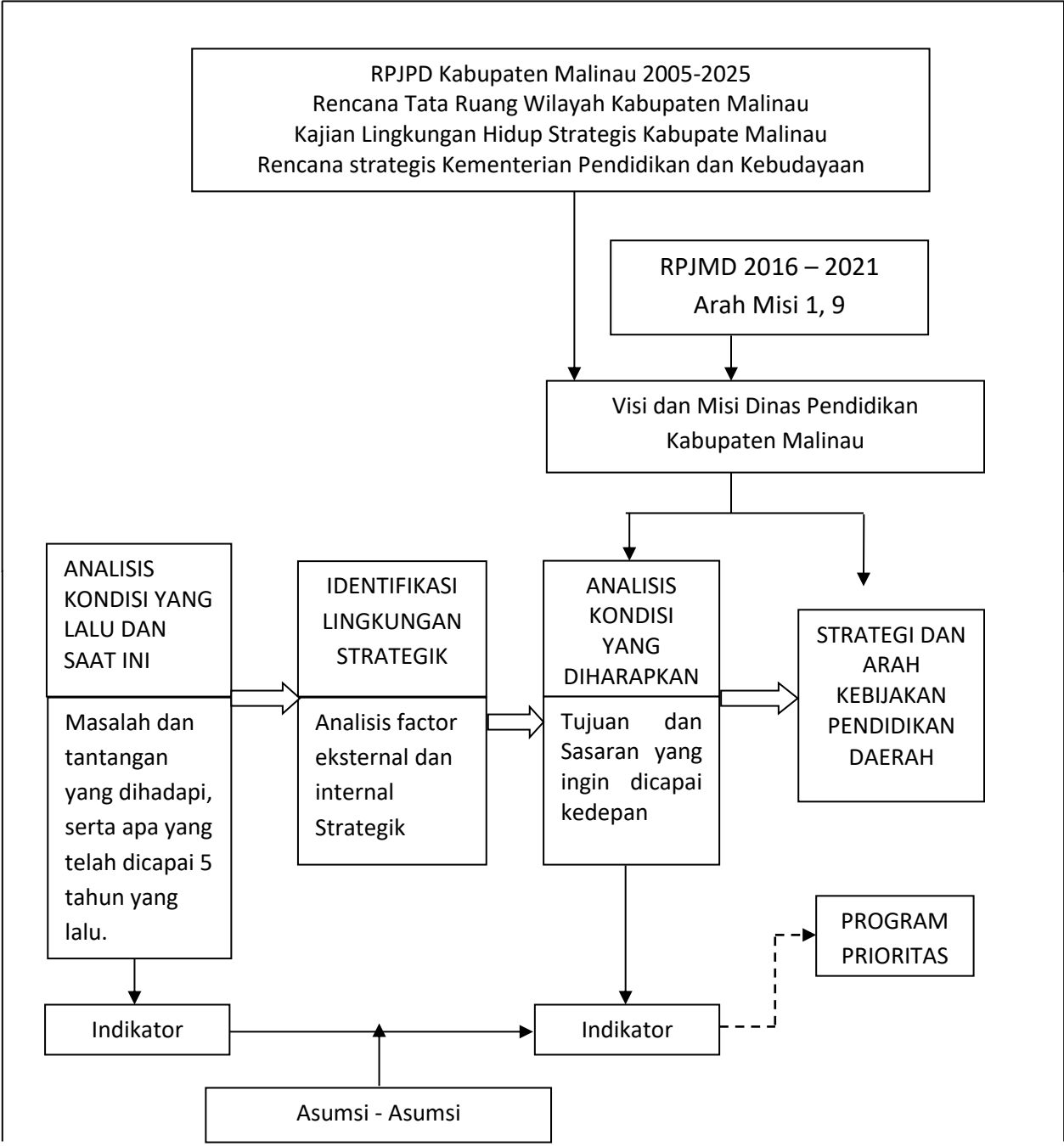
1. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan**
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**
- Bab. VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Bab VIII : Penutup**

2. Kerangka Pikir

Penyusunan Renstra diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pendidikan daerah serta program-program pendidikan, dilakukan dengan mengacu pada hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD, dengan berdasarkan RPJPD Kabupaten Malinau, RTRW Kabupaten Malinau, Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kalimantan Utara.

Gambar 1
Kerangka Pikir Renstra Dinas Pendidikan Kab. Malinau



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagai tindak lanjut atas peraturan hukum tersebut diatas, dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau selanjutnya dirubah sesuai Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dimana dilaksanakan perubahan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.

Peraturan perangkat daerah didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa dinas, badan, sekretariat serta kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
 - o Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - o Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

- Seksi PAUD
- Seksi Pendidikan Non Formal
- Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - Seksi Kurikulum
 - Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - Seksi Sarana dan Prasarana
- Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - Seksi PTK Sekolah Dasar
 - Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memiliki 6 (enam) UPTD yaitu (1) UPTD wilayah Mentarang, Mentarang Hulu dan Perwakilan Sungai Tubu berkedudukan di Pulau Sapi; (2) UPTD wilayah Malinau Selatan berkedudukan di Long Loreh; (3) UPTD wilayah Kayan Hulu, Kayan Selatan dan Kayan Hilir berkedudukan di Long Nawang; (4) UPTD wilayah Pujungan dan Bahau Hulu berkedudukan di Long Pujungan; (5) UPTD wilayah Sungai Boh dan Perwakilan Long Sule berkedudukan di Mahak Baru; (6) UPTD wilayah Malinau Kota, Malinau Utara dan Malinau Barat berkedudukan di Malinau Kota.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Guna melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi serta mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program perencanaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, yang memiliki tugas pokok melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Dinas.

II. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;

- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PAUD dan pendidikan non formal bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan;
- f. Penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang PAUD, pendidikan non formal, penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pendidikan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PAUD.

3. Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan non formal.

4. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan

Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang pendidikan.

III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan pendidikan dasar di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan pendidikan dasar bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;

- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- f. Penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang kurikulum, kelembagaan dan peserta didik, sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Kurikulum

Seksi Kurikulum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum.

3. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan peserta didik.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tugas perbantuan bidang sarana dan prasarana.

IV. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal, PTK Sekolah Dasar dan PTK Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pembinaan PTK di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal, PTK Sekolah Dasar, dan PTK Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK PAUD dan pendidikan non formal.

3. Seksi PTK Sekolah Dasar

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Dasar.

4. Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama

Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang PTK Sekolah Menengah Pertama.

V. UNIT PELAKSA TEKNIS DINAS (UPTD)

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis dari sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahliannya;
- Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

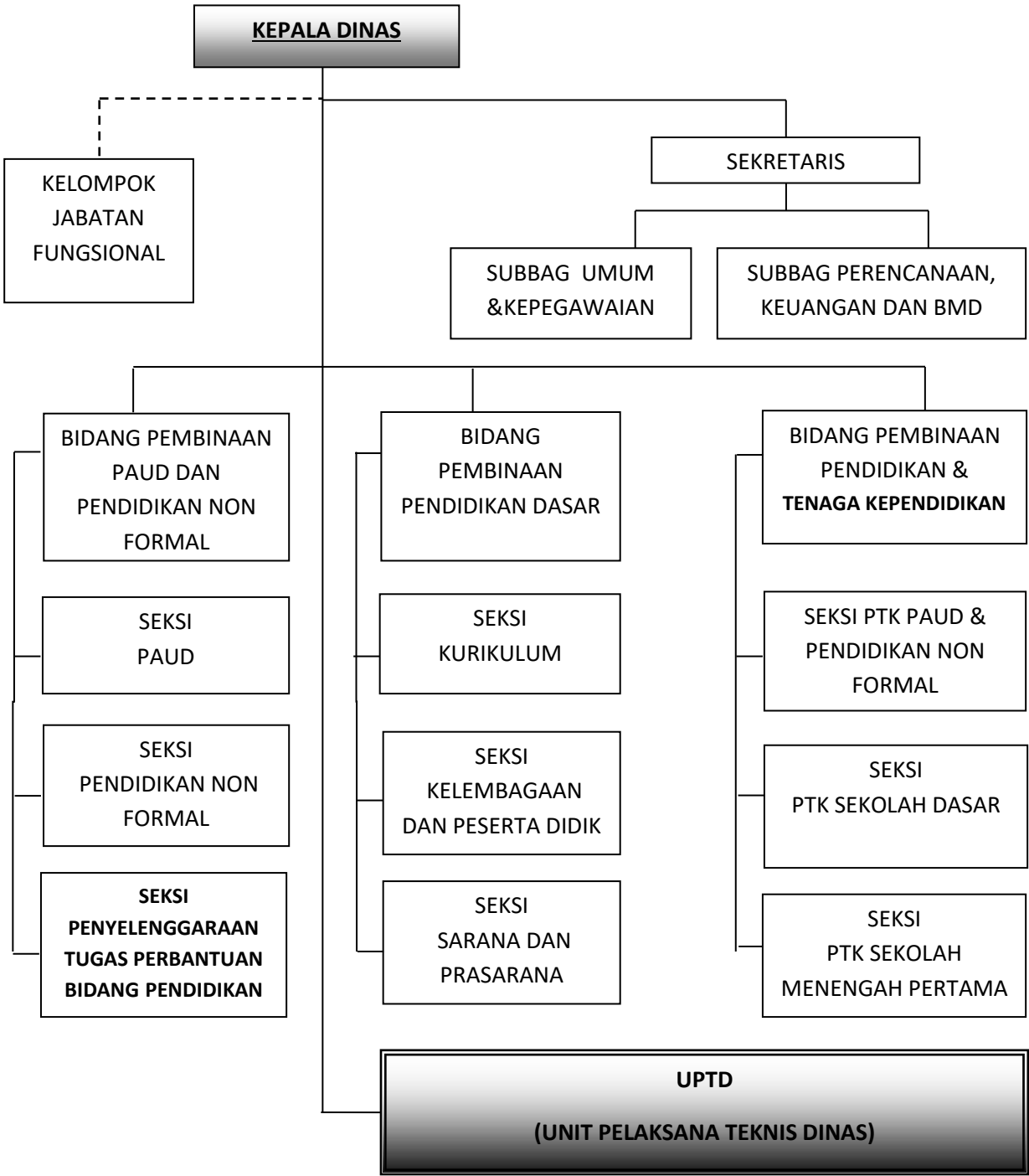
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 1. Seksi PAUD
 2. Seksi Pendidikan Non Formal
 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 1. Seksi Kurikulum
 2. Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- V. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

- 2. Seksi Sekolah Dasar
- 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU**



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

Berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut:

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I dalam bidang pendidikan, hukum, manajemen dan/atau teknik sipil.
- Setiap Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/manajemen.
- Staf di seksi teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu pendidikan. Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 90% minimal berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur Dinas Pendidikan hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai permasalahan pendidikan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang kependidikan, memahami dan berpengalaman dalam proses-proses keorganisasian. Kemampuan dalam melakukan pembinaan dan kepemimpinan.Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2017

No.	Bagian/Bidang	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretariat	25
3.	Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal	9
4.	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	13
5.	Bidang Pembinaan PTK	9
6.	UPTD	15
7.	Pengawas Sekolah (Jabatan Fungsional)	18
Jumlah		80

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.2
 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
 Kabupaten Malinau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	
2.	Sarjana (S1)	24	
3.	Diploma III (D-III)	3	
4.	Diploma II (D-II)	-	
5.	Diploma I (D-I)	-	
6.	SMA	28	
7.	SMP	-	
8.	SD	-	
Jumlah		57	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.3
 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
 Kabupaten Malinau Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang
 Tahun 2017

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina TK. I IV/b	2	
2.	Pembina IV/a	5	
3.	Penata TK. I III/d	5	
4.	Penata III/c	3	
5.	Penata Muda TK. III/b	6	
6.	Penata Muda III/a	4	
7.	Pengatur TK. I II/d	4	
8.	Pengatur II/c	18	
9.	Pengatur Muda TK. I II/b	6	
10.	Pengatur Muda II/a	3	
11.	Juru TK. I I/d	-	
12.	Juru I/c	-	
13.	Juru Muda TK. I I/b	-	
14.	Juru Muda I/a	-	
Jumlah		57	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Eselon
Tahun 2017

No.	Bagian/Bidang	Jumlah	Keterangan	
			Definitif	Ttd.Definitif
1.	Eselon II/a	1	1	-
2.	Eselon III/a	1	1	-
3.	Eselon III/b	3	3	-
4.	Eselon IV/a	16	16	-
5.	Eselon IV/b	5	5	-
Jumlah		26	26	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

4. Sarana Prasarana Dinas Pendidikan

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Tanah	2 Bidang	
2.	Alat-alat angkut: <ul style="list-style-type: none"> Mobil (roda empat) Bus Sepeda motor (roda dua) 	2 unit 1 unit 13 unit	Kepala Dinas dan sekretaris Jemputan Sekolah Operasional
3.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	270 unit	
4.	Bangunan gedung	2 gedung	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2017)

5. Anggaran

Anggaran Dinas Pendidik Kabupaten Malinau, yang masih merupakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau
Tahun 2013- 2016

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	2011	109.093.487.910	138.291.560.896	247.385.048.806
2.	2012	105.760.691.471	163.628.297.350	269.388.988.821
3.	2013	124.727.738.989	180.216.819.850	304.944.558.839
4.	2014	135.462.778.537	156.536.465.250	291.999.243.787
5.	2015	160.332.651.768	104.193.639.985	264.526.441.753
6	2016	154.424.000.373	75.358.644.220	229.782.644.593

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD (2017)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
A	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)																		
A.1	SD/MI																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SD 3 km daerah terpencil				82.41	84.26	87.04	90.74	93.52	82.41	84.26	87.04	90.74	93.52	100	100	100	100	100
2	% Jarak Mak 3km untuk MI 3 km daerah terpencil						50.00	66.67	100			50.00	66.67	100	100	100	100	100	100
3	% yang mengajar 1 guru dengan 32 siswa				97.70	98.91	94.12	97.70	98.91	97.70	98.91	94.12	97.70	98.91	100	100	100	100	100
4	% SD yang memiliki 6 guru				93.10	94.57	92.94	93.10	94.57	93.10	94.57	92.94	93.10	94.57	100	100	100	100	100
5	% MI yang memiliki 6 guru				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	% setiap rombongan yang cukup meja dan kursi				91.95	94.57	88.24	91.95	94.57	91.95	94.57	88.24	91.95	94.57	100	100	100	100	100
7	% SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi				98.85	100	97.65	98.85	100	98.85	100	97.65	98.85	100	100	100	100	100	100
5	% Kepala sekolah kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik				90.80	94.57	89.41	90.80	94.57	90.80	94.57	89.41	90.80	94.57	100	100	100	100	100
6	% SD yang memiliki 2 guru yang bersertifikat Pendidik				66.67	68.48	65.88	66.67	68.48	66.67	68.48	65.88	66.67	68.48	100	100	100	100	100
A.2	SMP/MTs																		
1	% Jarak Mak 3km untuk SMP 6 km daerah terpencil				78.70	87.04	74.07	78.70	87.04	78.70	87.04	74.07	78.70	87.04	100	100	100	100	100
2	% SMP yang mengajar 1				92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	100	100	100	100	100

	guru dengan 36 siswa																		
3	% MTs yang mengajar 1 guru dengan 36 siswa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	% SD yang tersedia ruang guru yang lengkap meja kursi				96.15	100	95.83	96.15	100	96.15	100	95.83	96.15	100	100	100	100	100	100
3	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran				84.62	92.59	75.00	84.62	92.59	84.62	92.59	75.00	84.62	92.59	100	100	100	100	100
4	% SMP yang memiliki 1 orang guru kualifikasi S1/DIV sesuai mata pelajaran						83.33	84.62	85.19			83.33	84.62	85.19	100	100	100	100	100
5	% Kepala SMP kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik				96.15	96.30	95.65	96.15	96.30	96.15	96.30	95.65	96.15	96.30	100	100	100	100	100
6	% guru SMP yang kualifikasi S1/DIV dan bersertifikat Pendidik diatas $\geq 35\%$				92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	92.31	96.30	91.67	92.31	96.30	100	100	100	100	100
B	TARGET IKK																		
B.1	Focus Kesehateraan																		
1	Angka Melek Huruf (AMH)			%	98.65	98.86	98.92	98.98	99.00	69.00	69.02	69.02	69.03	69.05	69.94	69.81	69.77	69.74	69.74
2	Rata-rata lama sekolah			Tahun	7.75	7.79	7.83	7.87	7.91	7.95	8.00	8.16	8.20	8.30	102.58	102.69	104.21	104.19	104.93
3	APK SD/MI			%	98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	87.00	89.00	91.15	94.15	97.25	87.99	89.96	92.08	95.05	98.12
4	APK SMP/MTs			%	90.36	90.97	91.58	92.19	92.80	87.00	90.00	93.00	95.10	97.25	96.28	98.93	101.55	103.15	104.79
7	APM SD/MI			%	86.94	86.96	86.98	87.00	87.03	70.00	72.00	73.84	75.00	77.66	80.51	82.79	84.89	86.20	89.23
8	APM SMP/MTs			%	86.53	86.55	86.66	87.00	87.20	70.15	73.00	76.00	79.00	81.77	81.07	84.34	87.69	90.80	93.77
B.2	Aspek Pelayanan Umum																		
B.2.1	Pendidikan Dasar																		
1	APS 7-12 Tahun			%	97.04	97.19	97.34	97.49	97.64	87.15	90.00	93.00	95.00	97.25	89.80	92.60	95.54	97.44	99.60

2	Rasio Guru/Murid SD/MI			Rasio	20	20	20	20	20	6	6	6	6	6	30	30	30	30	30
3	APS 13-15 Tahun			%	88.01	88.12	88.14	88.15	88.17	85.20	89.15	90.15	92.15	94.84	96.80	101.16	102.28	104.53	107.56
4	Rasio Guru/Murid SMP/MTs			Rasio	21	21	21	21	21	7	7	7	7	7	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
5	Angka Putus Sekolah SD/MI			%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			%	3.01	3.00	2.98	2.97	2.96	2.96	2.95	2.93	2.91	2.90	98.33	98.33	98.32	97.97	97.97
7	Angka Kelulusan SD/MI			%	89.00	89.80	90.60	91.40	92.20	100	100	100	100	100	112.35	111.35	110.37	109.40	108.45
8	Angka Kelulusan SMP/MTs			%	67.90	68.00	70.00	72.00	73.00	100	100	100	100	100	147.27	147.05	142.85	138.88	136.98
B.2.2	PAUD																		
1	APK PAUD				98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	98.87	98.93	98.99	99.05	99.11	100	100	100	100	100

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

Uraian	Anggaran pada Tahun (Juta) Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun(Juta) Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Anggaran	269.389	304.955	391.999	264.526	229.782	235.834	273.864	269.583	256.548	219.801	0.88	0.90	0.92	0.97	0.87	0.98	0.99

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksploitasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (lokal wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Malinau yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekwensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintahlah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau,

yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1. Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan;
- 2. Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.
- 3. SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.
- 5. Terbentuknya lembaga pendukung pendidikan yaitu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- 6. Kebudayaan lokal yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.
- 7. Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (*up to date*) dan teknologi.Koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan wewenang dan urusan masing-masing antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2.9
Identifikasi dan Analisis Kekuatan (*Strengths*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Regulasi, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kependidikan,	0,15	4	0,225
2.	Tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pendidikan yang jelas, tegas dan pasti dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas maupun pekerjaan.	0,15	4	0,225

3.	SDM Dinas Pendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja dalam bidang pendidikan yang mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan.	0,15	4	0,175
4.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malinau.	0,15	4	0,125
5.	Lembaga pendukung pendidikan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.	0,15	4	0,150
6.	Kebudayaan lokal yang hidup dalam masyarakat Malinau sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal.	0,15	3	0,125
7.	Sistem Teknologi Informasi yang sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman (<i>up to date</i>) dan teknologi.	0,10	3	0,125
		100		1,015

Sumber: Dinas Pendidikan

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana *reward* and *punishment* belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.
3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dibidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
4. Pengkoordinasian serta pensinkronisasian program kegiatan Dinas Pendidikan yang belum optimal.
5. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global.
6. Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “*outside the box*” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.
7. Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.10
 Identifikasi dan Analisis Kelemahan (*Strengths*)
 Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana <i>reward and punishment</i> belum menjadi bagian utama dalam indikator keberhasilan kinerja	0,15	4	0,125
2.	Keterbatasan wewenang dan urusan dari Dinas Pendidikan yang secara umum masih berperan sebagai fasilitator maupun regulator.	0,10	3	0,125
3.	Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia	0,15	2	0,125
4.	Pengkoordinasian serta sinkronisasi program kegiatan Dinasyang belum optimal.	0,15	2	0,150
5.	Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran nasional maupun internasional sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan global..	0,15	3	0,125
6.	Belum adanya kebiasaan untuk berpikir “ <i>outside the box</i> ” yang mampu memberikan sumbangan pemikiran yang inovatif dan kreatif.	0,15	4	0,150
7.	Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang terbatas dalam penyelenggaraan pendidikan	0,15	2	0,175
		100		0,705

Sumber: Dinas Pendidikan

2. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;
2. Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang;

3. Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong;
4. Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal;
5. Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau;
6. Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan;
7. Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan Kabupaten Malinau.

Tabel 2.11

Identifikasi dan Analisis Peluang (*Opportunities*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Malinau sebagai Kabupaten Konservasi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia menjadikan Malinau sebagai tempat tujuan dan pusat penelitian IPTEK;	0,15	4	0,145
2.	Kondisi lingkungan Kabupaten Malinau yang kondusif, aman, damai dengan dukungan karakter budaya masyarakat yang tenang.	0,15	4	0,125
3.	Kebudayaan dan adat istiadat Dayak yang menjunjung tatanan kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai, serta hidup dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong.	0,15	4	0,135
4.	Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal.	0,15	4	0,145
5.	Persamaan Persepsi diantara pemangku kebijakan (<i>stakeholders</i>) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,15	3	0,145
6.	Perkembangan arus informasi dan telekomunikasi dalam mendukung kemajuan bidang pendidikan.	0,15	4	0,145

7.	Perhatian dan apresiasi dari pemerintah dan dunia usaha terhadap kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Malinau.	0,10	3	0,145
		100		0,985

Sumber : Dinas Pendidikan

b. Ancaman (*Threats*)

1. Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi
2. Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan;
3. Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis;
4. Adanya biaya tinggi (*high cost*) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan
5. Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir;

Tabel 2.12
Identifikasi dan Analisis Ancaman (*Threats*)
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1.	Arus globalisasi dan modernisasi di bidang telekomunikasi.	0,20	4	0,125
2.	Faktor geografis Kab. Malinau yang menyulitkan dalam pembangunan Pendidikan.	0,20	4	0,125
3.	Menipisnya nilai-nilai budaya pada generasi muda, yang berpikir praktis dan pragmatis.	0,20	4	0,125
4.	Adanya biaya tinggi (<i>high cost</i>) dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan	0,20	4	0,128
5.	Sumber daya aparatur tenaga pendidik yang kurang siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh terisolir.	0,20	4	0,125
		100		0,628

Sumber : Dinas Pendidikan

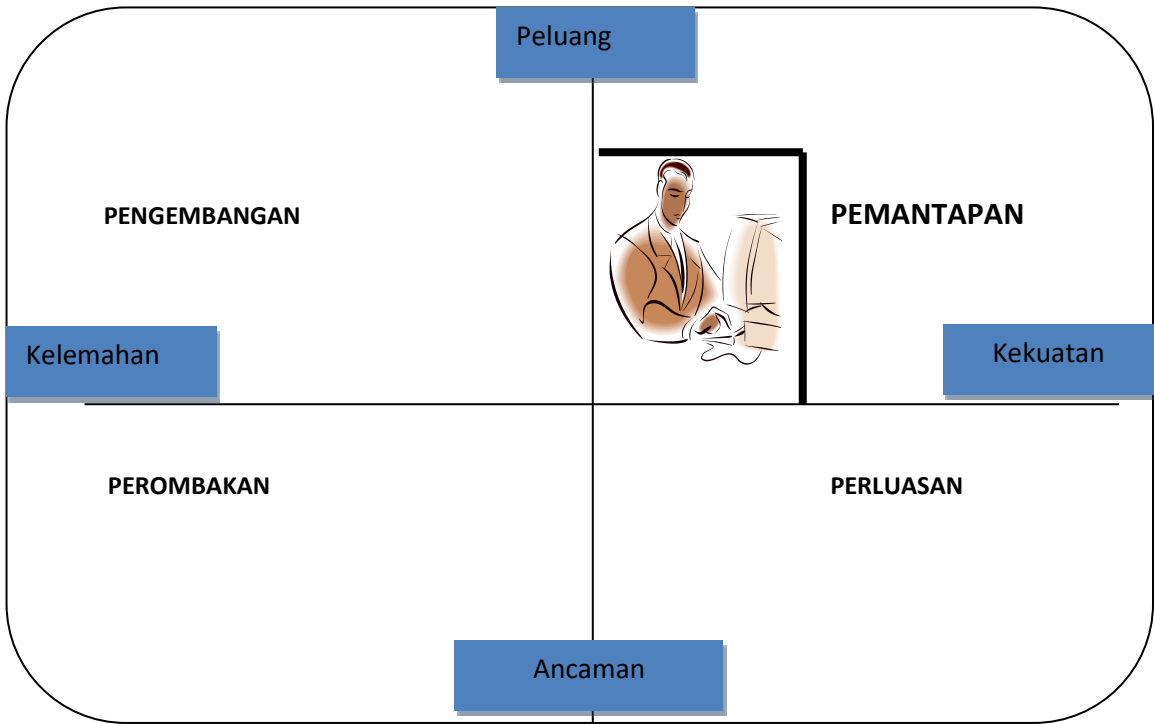
B. Matriks Posisi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Tupoksi

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Malinau, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.13
Posisi Dinas Pendidikan Kab. Malinau

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
KEKUATAN	1,015	PELUANG	0,985
KELEMAHAN	0,705	ANCAMAN	0,628
KESEIMBANGAN	0,310	KESEIMBANGAN	0,357

Gambar Posisi dan Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau



C. Asumsi Pilihan dan Pilihan Strategis

Memperhatikan hasil dari analisis SWOT seperti tertera di atas serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Kembangkan serta tingkatkan kepercayaan masyarakat termasuk masyarakat di luar Kabupaten Malinau bahwa Pendidikan di Kabupaten Malinau dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikannya melalui peningkatan kualitas di semua sumberdaya pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan.
2. Kembangkan dan manfaatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Malinau yang cukup baik terhadap pendidikan untuk mendukung terciptanya lembaga pendidikan yang kompetitif dan lingkungan yang kondusif.
3. Tingkatkan kualitas profesionalisme dan komitmen aparat dinas, penyelenggara lembaga pendidikan serta tingkatkan manajemen pendidikan di Kabupaten Malinau.
4. Tumbuh kembangkan moral kerja pada semua sumber daya manusia pendidikan dengan menerapkan “reward and punishment” untuk memperoleh SDM yang berkualitas kompetitif.
5. Manfaatkan dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
6. Tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi disemua program pendidikan baik antar pemerintah, lembaga pendidikan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk menghindari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga serta mengantisipasi perkembangan persaingan.
7. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.
8. Cipta dan kembangkan pusat informasi pendidikan dan promosi pendidikan.
9. Manfaatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam penerapan kebijakan baru, untuk menghindari bongkar pasang kebijaksanaan.
10. Adakan “Penilaian penyelenggaraan pendidikan” di tingkat daerah untuk mengetahui kelayakan sebuah institusi pendidikan yang berkualitas.
11. Ciptakan kegiatan yang dapat berlangsungnya akulturasi budaya antara pendatang dan tuan rumah, sehingga tercipta saling pengertian.
12. Penerapan dan penggunaan nilai-nilai budaya sebagai kearifan dan keunggulan lokal dalam pendidikan, sehingga membentuk anak-anak didik yang memiliki kekhasan dan karakter berbudaya yang adiluhur.
13. Adakan kampanye anti napza dan penyakit masyarakat lainnya serta tegakkan supremasi hukum.

14. Dorong dan fasilitasi terciptanya lingkungan masyarakat yang kondusif terhadap pendidikan dan ikut menjadikan lingkungan yang siap bersaing.

Dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Malinau yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
 1. Sumber daya (masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi persaingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
 2. Hubungan yang harmonis dan selaras antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum tercipta.
 3. Kesadaran hukum dan tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan hukum masih belum terbentuk dengan sempurna.
 4. Kesulitan dalam masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi dan mengurangi masalah narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, karena kurangnya kesatuan rasa dan sepenanggungan tindakan sebab akibat.
 5. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana kemudahan akses memperoleh sistem informasi teknologi masih digunakan hanya sebatas chatting maupun browsing situs-situs non pendidikan.
- b. Faktor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
 1. Adanya hubungan yang baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).
 2. Adanya dukungan organisasi pendidikan seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Organisasi Swasta lain sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
 3. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
 4. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
 5. Ketersediaan Sistem Informasi Pendidikan.

6. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai dasar membentuk dan mewujudkan karakter dan budi pekerti luhur dari anak-anak didik.
7. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan system “*reward and punishment*” yang berkeadilan.
8. Jalinan hubungan dan dukungan yang harmonis dan sinkron dari semua sumber daya pendidikan yang ada.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB II), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasana jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2015 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan,
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius,. dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan

tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan.

- c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan,
- d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah(RRLS).
- e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan,

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, adapun misinya adalah :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu jalan air bersih, listrik telekomunikasi dan informasi;

- (4) Meningkatkan Perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada *ekonomi kerakyatan* yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, Pasar bank dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa “one village one product” dengan semboyan “bertani sehat”;
- (6). Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara;
- (7). Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribada menurut agama masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif, dalam berkebun dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
- (9). Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10). Meningkatkan peran Pemuda dan perempuan dalam pembangunan Daerah., melalui peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan;
- (11). Mengembangkan Seni Budaya dan Pariwisata Daerah dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan;
- (12) Memantapkan kapasitas pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat,

Dari dua belas misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Misi ke-satu. dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran (a) meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah; (b) meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah; (c) meningkatkan minat baca masyarakat.

Misi ke sembilan, dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai (1) meningkatkan administrasi pemerintahan, dengan sasaran (a) terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif; (b) terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (c) terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan (2) meningkatkan kinerja pelayanan public, dengan sasaran terwujudnya pelayanan public yang cepat mudah, bermutu dan adil.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Utara

Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019 **“TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**, yang terdiri dari lima misi, yaitu :

- (1). Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- (2). Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan
- (3). Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- (4). Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- (5). Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan public.

Dalam enam tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Tujuan 1 : penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, dengan sasaran (a). meningkatkan perilaku positif siswa, (b) meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan (c) meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual dan social

Tujuan 3 : Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Anak berkebutuhan khusus, dengan sasaran (a) meningkatnya akses pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat diseluruh provinsi, kabupaten dan kota (b) meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan 4 : peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dengan sasaran (a) meningkatnya mutu PAUD dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (b)meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah (c) meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan (d) meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga,

Tujuan 6 : peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan public, dengan sasaran (a) meningkatkan akuntabel kinerja (b) meningkatnya pelibatan public dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan.

3.4. Telaah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malinau sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan.RPJMD Kabupaten Malinau memuat stratagi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau secara berkelanjutan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021.

Hubungan KLHS terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 juga dimaksudkan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi aparat Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperbaiki Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dicantumkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Malinau

Pengkajian isu strategis merupakan langkah awal sebelum mengkaji secara rinci pengaruh tiap kebijakan, rencana dan program (KRP) RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malinau terhadap pembangunan berkelanjutan. Proses tersebut dilakukan setelah proses identifikasi stake holder dan KRP terkait isu-isu strategis di wilayah Kabupaten Malinau. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada sudut pandang aspek lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini KLHS diselenggarakan sebagai proses yang terpisah dengan sistem AMDAL dan menggunakan prosedur dan pendekatan yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai atau memiliki karakteristik sebagai penilaian lingkungan. Pola kelembagaan semacam ini terbentuk karena terkait dengan proses pengambilan keputusan di Parlemen atau Kabinet. Dalam beberapa kasus, KLHS diselenggarakan sebagai bagian dari penilaian yang lebih luas atau sebagai bagian dari uji kebijakan yang lain.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan penelaahan isu-isu strategis yang memiliki fokus sama, maka akan diperoleh beberapa KRP dalam hubungannya dengan isu-isu strategis lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Malinau (2011 – 2031)

Kajian Pengaruh Kebijakan, Rencana Dan Program Terhadap Pembangunan Berkelanjutan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malinau yang dianggap penting dan berpengaruh bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari 9 (Sembilan) kebijakan rencana dan program yang diidentifikasi dalam hubungannya dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan setelah melalui proses kajian diperoleh 7 (tujuh) KRP yang secara holistik mempengaruhi pembangunan sehingga perlu ditelaah lebih lanjut guna mengetahui tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran erencanaan pembangunan nasional periode tahun 2015-2019; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten malinau terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi factor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- 2) Penyebaran saran pendidikan yang belum merata;
- 3) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 4) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 5) Implementasi kurikulum 2013.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan dengan program unggulan daerah yaitu wajib belajar 16 (enam belas) tahun dengan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
2. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)
3. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)
4. Peningkatan Angka Melek Huruf
5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Dalam rangka merealisasikan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan;

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah;
3. Meningkatkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif;
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

				TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran					
1.	Meningkatnya kinerja administrasi pemerintahan	1. Meningkatkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.	Persentase Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
		2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase Laporan Dinas	100	100	100	100	100
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
2.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) /Persentase - SD/MI - SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) /Persentase - APS 7-12 Tahun - APS 13-15 Tahun Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	96,28 76,71	96,29 76,72 \	96,30 76,73	96,32 76,74	96,33 76,78
				99,33 90,69	99,34 90,70	99,36 90,71	99,37 90,72	99,38 90,74
				8,48	8,97	9,56	9,87	10,20

			Persentase Angka Melek Huruf	83,14	83,25	83,36	83,57	83,88
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					
		2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah	Persentase Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	100 98,98	100 99,00	100 99,01	100 99,03	100 99,04

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan maka strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan secara berjenjang dari level staf s.d pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.
3. Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan.
4. Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik
5. Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa
6. Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan
8. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata.
9. Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata
10. Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
11. Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku
- Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
- Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh *stakeholder* dan masyarakat secara luas.

- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
- Penuntasan wajib belajar 16 tahun yang menjadi salah satu program unggulan daerah.
- Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul.
- Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
- Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan.
- Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah	Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan	Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan
		Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata	Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul

	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi.
		Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku .	Penuntasan wajib belajar 16 tahun secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan.
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas
		Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar	Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan
		Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.	Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak
Misi 9 : Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah \Kebijakan
Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Peningkatan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan

			hukum yang berlaku
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik.	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan public kependidikan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan	Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh <i>stakeholder</i> dan masyarakat secara luas.

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam mencapai target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

Sasaran RPJMD Yang Berhubungan dengan Tupoksi
Dinas Pendidikan Kab. Malinau

	Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Indikator Kinerja
Misi Ke-1	Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik	
Tujuan	Meningkatkan derajat pendidikan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	APS SD/MI APS SMP/MTs APM SD/MI APM SMP/MTs Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf
	Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs
Misi Ke-9	Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelolah pemerintahan yang bebas Koroupsi, Kolusi dan Nepotisme.	
Tujuan	Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan	
Sasaran	Terwujudnya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Persen-tase SKPD dengan status laporan kinerja baik
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase SKPD dengan laporan keuangan baik sesuai dengan aturan yang berlaku

Tabel 6.1																			
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan																			
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau																			
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau																			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif (dalam juta)								Kondisi Kinera pada akhir periode Renstra SKPD	Unit kerja penanggung jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020					2021	
							Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1		2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Meningkatkan Kinerja Administrasi Pemerintah	Peserntase Kinerja administrasi Pemerintah	Terwujudnya administrasi Pemerintahan yang efesien dan efektif																	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	75,64 2.370.941.444,00													
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%		100	263	100	70	100	50	100	70	100	70	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	%				100	##	100	198	100	150	100	150	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%		100	150	100	30	100	30	100	45	100	45	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	%		100	124	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	%		100	475	100	##	100	600	100	985	100	1200	Dinas Pendidikan Malinau		
				Penunjang Administrasi Pemerintah	%		100	677	100	##	100	365	100	520	100	520	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor	%		100	28	100	75	100	45	100	65	100	65	Dinas Pendidikan Malinau		
				Penyediaan Jasa Cleaning Service pada Dinas Pendidikan	%		100	149	100	##	100	198	100	198	100	198	Dinas Pendidikan Malinau		
				Penunjang Administrasi BOS/BOSDA Jenjang SD/Mi	%		100	186									Dinas Pendidikan Malinau		
				Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru	%		100	35									Dinas Pendidikan Malinau		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	99,76 1.100.673.500,00													
				Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	%			-	100	36	100	40	100	175	100	90	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
		Terwujudnya pengolahan keuangan daerah yang akuntabel		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	1 Tahun	0 0													
				Penyusunan Data dan Dokumen Perencanaan	%				100	99	100	69	100	95	100	100	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perencanaan	%						100	58	100	140	100	150	Dinas Pendidikan Kab. Malinau		

Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Tingkat derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah																	
			Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Tahun	91.50 244.380.200,00														
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) TKN Patama	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	36	1 Sekolah	40	1 Sekolah	36	1 Sekolah	54	1 Sekolah	54		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) TKN Wana Kencana	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	36	1 Sekolah	40	1 Sekolah	36	1 Sekolah	39	1 Sekolah	39		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Penunjang Administrasi Peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD ke S1	Jumlah Kegiatan		1 keg.	45										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Penunjang Administrasi, Operasional dan insentif PAUD	Jumlah Kegiatan		1 keg.	99	1 keg	20								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Penunjang Administrasi BOP PAUD	Jumlah Kegiatan		1 keg.	44	1 keg	30	1 keg	75						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Penunjang Administrasi BOP PAUD dan BOSDA	Jumlah Kegiatan								1 keg	200	1 keg	200		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Dana BOSDA TK Pratama Kecamatan Malinau Kota	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	31	1 Sekolah	31	1 Sekolah	30	1 Sekolah	31	1 Sekolah	31		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Dana BOSDA TK Wana Kencana Kecamatan Malinau Barat	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	25	1 Sekolah	25	1 Sekolah	22	1 Sekolah	22	1 Sekolah	22		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Menov Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD	Jumlah Kegiatan							75	1 keg	240	1 keg	240		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			DAPODIK PAUDNI	Jumlah Dokumen		1 dokumen	117										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Pelatihan Kurikulum 2013 jenjang PAUD	Jumlah Guru				60 Guru	##			60 Guru	300	60 Guru	300		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Akreditasi PAUD dan PNF	Jumlah Lembaga				15 Lembaga	##	15 Lembaga	71	20 Lembaga	147	20 Lembaga	220		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Diklat Lanjutan Tutor PAUD	Jumlah Guru						40 Guru	125						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Diklat Dasar PAUD	Jumlah Guru								80 Guru	250	80 Guru	250		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Penunjang Oprasional dan Isentif PTK PAUD-PNF	Jumlah PTK						521 PTK	90						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Pelatihan Operator Dapodik PAUD Dikmas/Non Formal	Jumlah Operator						50 Operator	100						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Peunjang Administrasi Peningkatan Kualifikasi S1 PAUD PNF	Jumlah Guru						39 Guru	45						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	
			Sertifikasi S1 Guru PAUD	Jumlah Guru								15 Guru	150	15 Guru	150		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau	

			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1 Tahun	64.02 10.455.703.545,00													
			Dana Bosda SD	Jumlah Sekolah		103 sekolah	##	102 sekolah	8,325	102 sekolah	8418						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Dana BOSDA SMP	Jumlah Sekolah				35 Sekolah	4,229	35 Sekolah	4302						Dinas Pendidikan	
			Dana BOSDA SD dan SMP	Jumlah Sekolah								1 Sekolah	13500	1 Sekolah	13500		Dinas Pendidikan	
			Relokasi SMAN 1 Malinau (SMA Kebangsaan)	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	##										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Relokasi SMPN 1 Malinau	Jumlah Sekolah		1 Sekolah	##										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			DAK Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	##	1 Kegiatan	1,216			1 Kegiatan	8000				Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pelaksanaan US dan UN SD/MI dan SMP/MTs dan Paket A, B,C	Jumlah Kegiatan		6 Kegiatan	76	5 Kegiatan	848	5 Kegiatan	850						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Evaluasi Belajar Sekolah	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	898										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penunjang Administrasi dan Beasiswa Miskin dan Berprestasi tingkat SD,SMP,SMA/SMK dan Mandiri	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	98										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			DAPODIK SD	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	197										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Olimpiade Sain nasional (OSN) dan Lomba Akademik Tingkat SD dan SMP	Jumlah Kegiatan		2 Kegiatan	246										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	Jumlah Jenjang Sekolah		2 Jenjang Sekolah	295										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Jenjang Sekolah		2 Jenjang Sekolah	334										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penunjang Administrasi BOS/BOSDA Jenjang SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Sekolah				137 sekolah	175	137 sekolah	195	137 sekolah	300				Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pembangunan RKB SDN 004 Kayan Selatan	Jumlah Ruang				6 Ruang	3,249								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Landscape dan Fasilitas Eks SMA Kebangsaan	Jumlah Sekolah				1 Sekolah	755								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pembangunan Jalan Lingkungan Eks SMA Kebangsaan	Jumlah Sekolah				1 Sekolah	142								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Landscape dan Fasilitas SMPN 1 Malinau	Jumlah Sekolah			1 Sekolah	267	12 Bulan	13,685						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan SD Kecil Sengayan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	50								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan SD Kecil Dumu Mahak	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	50								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			DAK Affirmasi Bidang Pendidikan	Jumlah Rumdin			2 Rumdin	265	6 Rumdin	1,070						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			DAK Reguler Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang			12 RKB	4,683	27 RKB	7,058						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Lanscape SDN 003 Malinau Utara	Jumlah Kegiatan			1 Kegiatan	35								Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penimbunan Landscape SDN 003 Malinau Utara	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	1,075						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pemasangan Keramik dan Plafon SDN 005 Malinau Kota	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	234				Dinas Pendidikan	
			Perencanaan dan Pembangunan Landscape dan Penimbunan Halaman SDN 008 Malinau Utara	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	980				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Gedung SDN 008 Mentarang Hulu	Jumlah Ruang							6 Ruang	2,100				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 005 Bahau Hulu	Jumlah Ruang							6 RKB	2,560				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 003 Mentarang Hulu	Jumlah Ruang							3 RKB	750				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Gedung SMP 3 Kayan Selatan	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	2,500				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 005 Sungai Tubu	Jumlah Ruang							4 ruang	1,550				Dinas Pendidikan	
			Relokasi Pembangunan Gedung SMP 3 Malinau Utara	Jumlah Ruang							3 ruang	2,000				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 007 Pujungan	Jumlah Ruang							3 ruang	890				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Jamban/Toilet siswa SMPN 2 Malinau Kota	Jumlah unit							1 unit	160				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan SD Kecil Sengayan	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	1,420				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan SDN 005 Malinau Selatan Hulu	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	300				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 004 Bahau Hulu	Jumlah Ruang							3 Lokal	890				Dinas Pendidikan	
			Pengadaan Meja Kursi siswa SMPN 1 Malinau selatan	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	150				Dinas Pendidikan	
			Pengadaan Meja Kursi siswa SDN 001 Malinau selatan	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	90				Dinas Pendidikan	

			Pembanguann Rumah Dinas Guru SDN 005 Kayan Hulu	Jumlah Kopel								2 Kopel	1,630				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Kantor SMPN 3 Mentarang	Jumlah unit								1 Unit	500				Dinas Pendidikan	
			Pembanguann Rumah Dinas Guru SDN 008 Mentarang Hulu	Jumlah Kopel								2 Kopel	915				Dinas Pendidikan	
			Pembanguann Rumah Dinas Guru SDN 007 Mentarang Hulu	Jumlah Kopel								1 Kopel	515				Dinas Pendidikan	
			Pembanguann Rumah Dinas Guru SDN 007 Pujungan	Jumlah Kopel								1 Kopel	415				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan SD Kecil Dumu Mahak	Jumlah Kegiatan								1 Kegiatan	1,620				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SMPN 4 Malinau Utara	Jumlah Ruang								2 ruang	830				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Malinau Barat	Jumlah unit								1 Unit	650				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB SDN 004 Malinau Selatan Hilir	Jumlah Ruang								3 RKB	1,380				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Kantor SDN 003 Sungai Boh	Jumlah unit								1 Unit	512				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Kantor SDN 004 Sungai Boh	Jumlah unit								1 Unit	512				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Kantor SDN 005 Sungai Boh	Jumlah unit								1 Unit	512				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Lab. Komputer SMPN 1 Malinau Utara	Jumlah unit								1 Unit	570				Dinas Pendidikan	
			Perencanaan Rehab Total SMPN 1 Malinau Utara	Jumlah unit								1 Unit	350				Dinas Pendidikan	
			Relokasi Pembangunan SDN 002 Kayan Hilir	Jumlah Ruang								3 Ruang	1,643				Dinas Pendidikan	
			Pembangunan RKB Sekolah	Jumlah Ruang										42 RKB	26,000		Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah unit										5 Unit	2,800		Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Lab Sekolah	Jumlah unit										10 Unit	4,700		Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit										7 Unit	3,500		Dinas Pendidikan	
			Pembangunan Rumah Dinas Kepsek dan Guru	Jumlah Kopel										8 Kopel	7,200		Dinas Pendidikan	
			Program Pendidikan Menengah	1 Tahun														
			Dana BOSDA SMP	Jumlah Sekolah		34 Sekolah	##										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SD Ranau Kecamatan Sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SD Long Nyau Kecamatan Sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas guru SMP 2 Kecamatan pujungan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SD Halanga Kecamatan Malinau Selatan Hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	44										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SD Laban Nyarit Kecamatan Malinau Selatan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	44										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SD Nahak kramo Kecamatan Malinau Selatan Hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Kantor SMP 2 Kecamatan Pujungan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	45										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 008 Long kebinu Kecamatan Mentarang hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Bahau Hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 007 Kecamatan Pujungan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 007 Kecamatan Pujungan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Bahau hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN long uli Kecamatan Bahau Hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	46										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Kayan hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 008 Long kebinu Kecamatan Mentarang Hulu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SD Ranau Kecamatan Sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SD Long nyau Kecamatan Sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Kantor guru SD 004 Kecamatan Sungai Boh (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor SDN 005 Kecamatan Sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Malinau Kota (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	44										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 005 Kecamatan Sungai Boh (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 002 Kecamatan Malinau Barat (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 004 Kecamatan Kayan Selatan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 004 Kecamatan Sungai Boh (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 003 Kecamatan Sungai Boh (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	50										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Perencanaan Pembangunan Rumah dinas guru SDN 005 Kecamatan Malinau Selatan hilir (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SDN 003 Kecamatan sungai Boh (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SMP 2 Kecamatan Pujungan (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	46										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SMP 3 Kecamatan Malinau Selatan hilir (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SMP 3 Kecamatan Malinau Utara (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Pembangunan RKB SMP 1 Kecamatan sungai Tubu (2016)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	51										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	44										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			DAPODIK SMP	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	193										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Liga Pelajar Indonesia (LPI)	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	186										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
		Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Tahun	79,10 21.961.332.073,00													
			Penunjang Administrasi Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS pada Sekolah Swasta dan Negeri	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	##										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	##					1 Kegiatan	17512	1 Kegiatan	17512		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD,SMP,SMA/SMK	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	15										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			LPI SMP dan SMA	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	158										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional Pengawas Sekolah	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	27										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			PORPROP (9 Cabor)	Jumlah Cabor		9 Cabor	3										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 8 Malinau	Jumlah Ruang		3 ruang	##									Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Rekrutmen dan pelatihan Kepala Sekolah dan calon kepala Sekolah	Jumlah Kepsek		62 Org	428									Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			TambahanPenghasilan Guru Non PNS (Bankeu Prov)	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	##	1 Kegiatan	3,288							Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penunjang Admnistrasi Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD ke S1	Jumlah PTK				40 PTK	263			80 PTK	700	80 PTK	700	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Sertifikasi Guru	Jumlah Guru				120 Guru	138							Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	150	1 Kegiatan	98	1 Kegiatan	200	1 Kegiatan	200	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pelatihan Kurikulum 13 Jenjang SD dan SMP	Jumlah Guru		120 Guru	434	120 Guru	498			120 Guru	500	120 Guru	500	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penunjang Admnistrasi Sertifikasi Guru SD, SMP dan Pengawas	Jumlah Kegiatan		1 Kegiatan	96	1 Kegiatan	40	1 Kegiatan	29					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pelatihan Dapodik Jenjang SD dan SMP	Jumlah Operator Dapodik				140 Operator	248	140 Operator	125	145 Operator	300	145 Operator	300	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penguatan Kurikulum 13 Jenjang SD dan SMP	Jumlah Guru					60 Guru		178					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Rekrutmen Kepala Sekolah SD dan SMP	Jumlah Kepsek					15 Kepsek		300					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Jumlah Komunitas					20 Komunitas SMP dan SD		200	30 Komunitas SMP dan SD	300	30 Komunitas SMP dan SD	300	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Olimpiade Sains Guru	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan			50					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan			100					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik (SD) Ke S1	Jumlah PTK					50 PTK		700	90 PTK	1284	90 PTK	1284	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan			184					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pengembangan sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah sekolah					142 SD dan SMP		290	142 SD dan SMP	500	142 SD dan SMP	500	Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penyusunan Pedoman , Profil Dinas Pendidikan dan Petunjuk Teknis Wajar 16 Tahun	Jumlah Buku					300 Buku		57					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dak Non Fisik)	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan			561					Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah Guru								30 Guru	650	30 Guru	650		

			Penunjang Administrasi Tunjangan Profesi guru SD, SMP dan pengawas	Jumlah Kegiatan								1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	100			
			Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi SD dan SMP	Jumlah Kepsek dan Pengawas								50 Orang	300	50 Orang	300			
			Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	Jumlah Calon Kepsek								23 Orang	500	23 Orang	500			
			Penguatan kepala sekolah SD dan SMP	Jumlah Kepsek								40 Kasek	400	40 Kasek	400			
			Olimpiade Guru Nasional SD dan SMP	Jumlah Guru								30 Orang	250	30 Orang	250			
			Peningkatan dan pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru					50 Guru	175	50 Guru	400	50 Guru	400				
			Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan SMP	Jumlah Guru								120 Guru	500	120 Guru	500			
			Insentif PTK PAUD, SD dan SMP	Jumlah Kegiatan								1 Kegiatan	3640	1 Kegiatan	3640			
			Kursus Dasar Pembina Pramuka	Jumlah Pembina Pramuka								40 org	300	40 org	300			
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 Tahun	33,01 446.221.350,00													
			Operasional Pengawas Sekolah	Jumlah Kegiatan		1 Keg	298	1 keg	750	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	750		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Malinau Kota	Jumlah Kecamatan		3 kec	44	3 Kecamatan	60	3 Kecamatan	60	3 Kecamatan	60	3 Kecamatan	60		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Mentarang	Jumlah Kecamatan		3 kec	72	3 Kecamatan	100	3 Kecamatan	100	3 Kecamatan	110	3 Kecamatan	110		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Malinau Selatan	Jumlah Kecamatan		3 kec	59	3 Kecamatan	75	3 Kecamatan	75	3 Kecamatan	75	3 Kecamatan	75		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Sungai Boh	Jumlah Kecamatan		1 kec	49	1 Kecamatan	75	1 Kecamatan	75	1 Kecamatan	75	1 Kecamatan	75		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Kayan Hulu	Jumlah Kecamatan		3 kec	74	3 Kecamatan	100	3 Kecamatan	100	3 Kecamatan	110	3 Kecamatan	110		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Operasional UPTD Pujungan	Jumlah Kecamatan		2 kec	98	2 Kecamatan	100	2 Kecamatan	100	2 Kecamatan	110	2 Kecamatan	110		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pengadaan Komputer dan Server Ujian Nasional berbasis komputer	Jumlah selver dan Komputer		5 Server 40 Kompute r	413	10 Serve r 50 kompu ter	650			15 Server 100 Komputer	1461	17 Server 100 Komputer	1581		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Peningkatan Mutu data dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan		1 kegiatan	190										Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Honor Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak	Jumlah Guru				317 Orang	###	317 Orang	15453						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Penunjang Administrasi Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS pada Sekolah Swasta dan Negeri	Jumlah Kegiatan			1 kegiatan	7	1 kegiatan	36						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Kegiatan			2 Kegiatan	300	2 Kegiatan	268	2 Kegiatan	260	2 Kegiatan	260		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Siswa			15 siswa/siswi	300	15 siswa/siswi	268	15 siswa/siswi	260	15 siswa/siswi	260		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah Kegiatan			1 keg	150	1 keg	250	1 keg	260	1 keg	260		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Dana Pendamping Kegiatan Inovasi	Jumlah Kegiatan			1 keg	100	1 keg	150	1 keg	175	1 keg	175		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Kegiatan					1 keg	24	1 keg	70	1 keg	70		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Monitoring Implementasi Kurikulum 2013	Jumlah Kegiatan					1 keg	93	1 keg	130	1 keg	130		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Liga Sepak Bola Indonesia SMP	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	248	1 Kegiatan	275	1 Kegiatan	275		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	48	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	100		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perkemahan Pelajar	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	79	1 Kegiatan	79		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Evaluasi Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah	Jumlah Sekolah					45 Sekolah	122						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Penunjang Administrasi dan Operasional Pendidikan Non Formal	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	50	1 Kegiatan	50	1 Kegiatan	70		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Bantuan Penguatan Kelembagaan PKBM	Jumlah Kegiatan					1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	99	1 Kegiatan	99		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Jumlah Guru					25 Tenaga Pendidik	470						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Aktivasi Kelembagaan PKBM	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	100		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Pelaksanaan US dan UN SD/MI dan SMP/MTs dan Paket A, B, C	Jumlah Kegiatan							1 Kegiatan	950	1 Kegiatan	950		Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Insentif Pendidikan Dan Tenaga Pendidik PAUD, SD dan SLTP Kab. Malinau	Jumlah PTK					380 Org	2412						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Penambahan RKB SMP 3 Mentarang	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	50						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Penambahan RKB TK Pratama	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	50						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Perencanaan Rumah Dinas Guru SDN 006 Bahau Hulu	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	30						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau

			Muebelair dan Pemasangan Keramik Ruang Kelas SD 006 Bahau Hulu	Jumlah Sekolah						1 Sekolah	100						Dinas Pendidikan	Kab. Malinau
			Bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	Jumlah TBM								6 TBM	146	6 TBM	146			
			Pelatihan dan Sosialisasi Operator DAPODIK PAUD dikmas	Jumlah Operator								120 Org	120	120 Org	120			
			Akreditasi SD dan SMP	Jumlah Sekolah								80 Sekolah	200	64 Sekolah	200			
			Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS	Jumlah Kegiatan								1 Kegiatan	158	1 Kegiatan	158			
							##		####		63,640		89,323		96,453			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan uraian mengenai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan serta komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD, maka indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ditampilkan dalam berikut ini :

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	APS SD/MI	99,31	99,33	99,34	99,36	99,37	99,38	99,38
2	APS SMP/MTs	90,67	90,69	90,70	90,71	90,72	90,76	90,76
3	APM SD/MI	96,26	96,28	96,29	96,30	96,32	96,33	96,33
4	APM SMP/MTs	80,43	80,80	81,72	83,13	85,01	85,45	85,45
5	Rata-rata Lama Sekolah	8,30	8,48	8,97	9,56	9,87	10,20	10,20
6	Angka melek huruf	83,03	83,14	83,25	83,36	83,57	83,88	84,08
7	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka kelulusan SMP/MTs	98,97	98,98	99,00	99,01	99,03	99,04	99,04

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Malinau dan setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan pelaksana harian Bagian Perencanaan.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris beserta bidang-bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
3. Seluruh Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Sekretariat dan Bidang Teknis/Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing berkewajiban untuk menyusun program kegiatan yang mengandung tujuan dan strategi yang ada dalam Renstra Tahun 2016 – 2021.
5. Agar Renstra Tahun 2016 – 2021 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap bidang teknis/fungsional, sekretariat dan UPTD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021 ini, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, instansi terkait maupun masyarakat luas.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2016 – 2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra tahun 2016– 2021, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, dilakukan oleh masing-masing kepala bidang teknis dan UPTD.

- b. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- c. Bagian Perencanaan menyusun evaluasi rencana kerja berdasar hasil evaluasi Kepala OPD.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2016–2021 dihadapkan pada hal-hal diluar kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat ditinjau melalui konsultasi dengan Bappeda untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

Malinau, 25 September 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.

FX. Brata Puji Susila, S.Pd, M.Pd.
NIP 19620722 198403 1 010